

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bab-bab tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi sudah berjalan akan tetapi kegiatan pengawasan dan penindakan masih belum maksimal yang dimana hal tersebut disampaikan oleh warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut pihak satuan polisi pamong praja membagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan cara anggota satuan polisi pamong praja melakukan pengecekan dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan himbauan untuk penyedia tempat hiburan dan hotel untuk saling bahu membahu memberantas pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan cara menerima pengaduan melalui media sosial yang dimiliki satuan polisi pamong praja. Dalam melakukan pengawasanpun anggota satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yang beranggotakan dua belas orang.
2. Dalam proses pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong

praja masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam proses pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi antara lain kurangnya sumber daya manusia yang dimana satuan polisi pamong praja hanya beranggotakan dua belas orang dalam proses pengawasan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja Kota Jambi masih banyaknya warga eks lokasi yang secara diam-diam menyediakan tempat hiburan yang berpotensi untuk tumbuhnya praktik pelacuran di Kota Jambi.

4.2. Saran

Walaupun pihak satuan polisi pamong praja telah melakukan upaya pengawasan dan penindakan namun warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi masih banyak yang merasakan bahwa praktik pelacuran dan perbuatan asusila masih banyak terjadi, oleh sebab itu satuan polisi pamong praja harus:

1. Dengan masih belum optimalnya satuan polisi pamong praja dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan diharapkan satuan polisi pamong praja lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung, diharapkan satuan polisi pamong praja lebih sering untuk turun kelapangan dengan agenda dadakan guna mencegah terjadinya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia.
2. Mengingat masih sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki satuan polisi pamong praja untuk melakukan pengawasan maka kedepannya diharapkan pihak satuan polisi pamong praja dapat memperbanyak lagi

sumber daya manusia yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan serta kepada warga eks lokasi dan masyarakat jambi untuk kedepannya lebih peduli dengan cara lebih aktif dalam melakukan pengaduan kepada satuan polisi pamong praja melalui media sosial yang telah disediakan. Hal tersebut demi suksesnya peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.